

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jepang atau Kekaisaran Jepang merupakan suatu negara yang secara geografis terletak di kawasan Asia Timur, berbatasan laut dengan Semenanjung Korea dan Rusia di sisi barat dan Samudra Pasifik di sisi timur. Dahulu Jepang terkenal dengan *image* negara agresif yang berpegang teguh pada asas *Fukoku Kyohei* (Negara kuat, militer kuat), namun status Jepang yang kalah dalam Perang Dunia II di tahun 1945 serta tekanan dari pendudukan AS dan sekutu memaksanya untuk merubah haluan negara menjadi negara berprinsip ekonomi (Jitsuo, 2000). Jepang mulai beralih fokus kepada urusan ekonomi atau *fukoku kenzai* (negara kuat, ekonomi kuat) dari yang sebelumnya *fukoku kyohei* (negara kuat dari militer yang kuat) melalui program *Official Development Assistance* (ODA) yang berfokus pada pemberian bantuan pinjaman dana untuk pemulihan negara pasca perang. Efek dari perubahan haluan militer ke ekonomi ini sukses memberikan pengaruh bagi Jepang yang saat ini dikenal sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia dibawah China dan Amerika Serikat serta mampu memberikan bantuan lebih luas kepada negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Indonesia memandang Jepang sebagai salah satu partner strategis dalam urusan perdagangan dan hubungan diplomatik lainnya. Sudah tidak dapat terhitung lagi betapa peran hubungan diplomasi yang terjalin lebih dari 60 tahun ini memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hubungan formal antara Jepang dan Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1958. Melalui pembentukan hubungan formal tersebut, kedua negara telah mengadakan beberapa bentuk perjanjian kerjasama seperti kerjasama *Official Development Assistance* (ODA) dan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA).

Kerjasama ODA merupakan pemberian bantuan dari pemerintah Jepang yang mempromosikan dan menargetkan pembangunan-pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di negara-negara berkembang. Kerjasama ODA Jepang dengan Indonesia telah dimulai sejak tahun 1960. Sementara itu, kerjasama IJ-EPA merupakan perwujudan kerjasama ekonomi yang berlandaskan prinsip *Free Trade Area* atau prinsip perdagangan bebas untuk menghilangkan hambatan perdagangan demi memudahkan terjadinya pertukaran barang atau perdagangan internasional. Kerjasama ini tercatat disepakati oleh Jepang dan Indonesia pada tahun 2007 setelah kedua negara melakukan studi banding yang dilakukan sejak tahun 2005.

Bentuk kerjasama ODA terwujud dalam kerjasama infrastruktur dan program kerjasama non-infrastruktur. Di bidang pembangunan infrastruktur telah dihasilkan berbagai output seperti pembangunan pabrik manufaktur dari Jepang di Indonesia, pembangunan MRT, pembangunan infrastruktur lain seperti jalan tol, penguatan transportasi berbasis rel dan pembangunan pelabuhan serta bandara (Japan Indonesia Cooperation Agency, 2018). Di bidang non-infrastruktur seperti kebudayaan tidak perlu diragukan lagi bahwa Jepang telah sedemikian besar memberi pengaruh melalui musik, anime, manga dan juga gaya hidup yang dibuktikan dengan dibentuknya salah satu cabang *idol group* terkenal dari Jepang yakni AKB48 di Indonesia yang bernama JKT48, dan berbagai *event-event* tahunan budaya pop Jepang.

Efek dari semangat *fukoku kenzai* atau semangat untuk menjadi negara yang memiliki kapasitas ekonomi yang kuat masih terus terasa hingga saat ini. Kekuatan ekonomi Jepang tersebut dapat dilihat dari nilai perdagangan barang dari Jepang ke Indonesia pada periode 2019. Nilai perdagangan pada periode tersebut mencapai angka USD 15.62 Miliar merupakan satu contoh bagaimana Jepang mampu memasarkan produknya dengan nilai yang besar ke Indonesia. Nilai yang tidak kalah fantastis juga ditunjukkan dari bagaimana Jepang melakukan Investasi ke Indonesia. Pada rentang tahun 2015 hingga tahun 2019,

Jepang telah menggelontorkan dana sebanyak USD 22,53 Miliar untuk investasi di Indonesia dengan angka realisasi sebesar USD 15,97 Miliar dan investasi mayoritas dalam sektor industri dan manufaktur (BPS RI, 2022).

Hubungan perdagangan Jepang dan Indonesia yang telah terjalin lama menempatkan Jepang sebagai negara tujuan ekspor terbesar ketiga bagi Indonesia, dan Indonesia merupakan negara tujuan ekspor kesepuluh pada tahun 2019 dengan nilai USD 15,62 Miliar. Komoditas dagang ke Jepang berupa gas alam, minyak bumi serta batu bara dan sebagai balasannya, Indonesia melakukan impor komoditas permesinan, produk plastik dan kimia, serta perlengkapan kelistrikan. Perlu diingat bahwa Jepang merupakan negara dengan kapasitas industri besar yang diandalkan sebagai tulang punggung perekonomian negara tersebut, dengan kapasitas produksi di sektor manufaktur – termasuk permesinan dan suku cadang – sendiri telah mencapai nilai US\$ 1,024 Miliar ditahun 2018 (Macrotrends, 2018). Nilai ekspor untuk sektor manufaktur dari Jepang ke Indonesia sendiri telah mencapai nilai US\$ 5,84 Miliar dan merupakan komoditas ekspor tertinggi (WITS, 2021)

Hubungan kerjasama ekonomi antara kedua negara antara Jepang dan Indonesia mengalami hambatan saat Pandemi COVID-19 muncul. Pandemi dimulai ketika virus yang memiliki nama asli *novel coronavirus* (2019-CoV) ini pertama kali ditemukan dan terdeteksi di Wuhan, China, tepatnya di sebuah Pasar Hewan yang diduga berasal dari kelelawar. Virus ini mulai menyebar dari orang ke orang dengan gejala paling umum yang dirasakan adalah sesak nafas, demam, kehilangan penciuman, serta nyeri di beberapa bagian tubuh. Kasus pertama penularan COVID-19 di Jepang terjadi pada 15 Januari 2021 di Prefektur Kanagawa setelah sebelumnya pasien berlibur ke Wuhan, China. Sedangkan di Indonesia sendiri kasus awal yang terdeteksi terjadi pada tanggal 1 Maret 2020 ketika sebuah keluarga asal Depok yang baru pulang berlibur dari China mengeluhkan gejala-gejala positif COVID-19 dan langsung ditangani oleh fasilitas kesehatan lokal.

Akibat dari penularan virus COVID-19, kehidupan masyarakat terdampak secara merata di seluruh dunia. Efek paling terasa bagi negara di kala pandemi ini adalah berkurangnya pendapatan dan devisa akibat berkurangnya aktivitas perdagangan internasional. Pemberian serangkaian bantuan langsung bagi masyarakat juga turut menyebabkan cadangan devisa Jepang pada tahun 2020 berada di angka USD 4,31 Miliar, angka ini mengalami penurunan drastis apabila dibandingkan dengan tahun 2019 dengan cadangan devisa masih sebesar USD 5,06 Triliun atau mengalami penurunan sebesar 4,8% pada tahun 2020 (MOFA , 2021).

Di sisi lain, kemunculan COVID-19 sebagai pandemi global berhasil menciptakan sebuah kebijakan untuk menghentikan segala aktivitas yang menimbulkan kerumunan. Hal ini berimbas pada penurunan kapasitas produksi industri dan lebih jauh lagi mengganggu siklus rantai suplai di seluruh dunia (METI Japan, 2020). Akibatnya, Jepang mengalami penurunan drastis di bidang perdagangan dengan mencatatkan penurunan sebesar 33,7% pada tahun 2020 di bidang ekspor sebesar USD 10.67 Miliar dibandingkan dengan tahun 2019 senilai USD 15,62 Miliar yang di dominasi sektor manufaktur otomotif. Begitu juga dengan Indonesia yang mencatatkan penurunan ekspor sebesar US\$ 76,41 miliar atau turun 5,49% dari US\$ 80,85 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 (BPS RI, 2020).

Hubungan kerjasama ekonomi antara kedua negara antara Jepang dan Indonesia sangat penting bagi kedua negara dan ini harus terhenti akibat mandeknya rantai pasokan komoditas industri dan menghambat laju perdagangan kedua negara. Sebagaimana kata pepatah *life must go on*, hubungan kerjasama bilateral kedua negara tidak boleh berhenti meski terdapat berbagai hambatan akibat pandemi COVID-19 seperti pengurangan volume dan intensitas perdagangan internasional dan pengetatan regulasi perdagangan. Berdasarkan pemaparan terkait hubungan kerjasama ekonomi antara Jepang dan Indonesia yang terganggu akibat pandemi COVID-19, penulis kiranya ingin mengetahui lebih lanjut

bagaimana resolusi dari problematika yang diajukan terutama oleh Jepang dalam melakukan kerjasama ekonomi ditengah pandemi COVID-19 dengan Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut yaitu: *Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Jepang dalam situasi pandemi COVID-19 untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Indonesia?*

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **Konsep Diplomasi Bencana**

Diplomasi menurut definisi dari K.M. Panikkar merujuk pada suatu usaha-usaha yang dilakukan oleh aktor dalam praktik yang melibatkan dua pihak atau lebih yang secara umum mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila memungkinkan, dalam berhubungan dengan negara lain dan apabila cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya (Roy, 1991). Salah satu bentuk paling umum diplomasi adalah dengan melakukan pertemuan secara langsung yang diwakili oleh para diplomat sebagai utusan dari masing-masing pihak untuk berunding secara damai dan memanfaatkan keahlian dan seni bernegosiasi atau *bargaining* dalam sebuah perundingan di suatu forum antarnegara. Dalam berdiplomasi sendiri biasanya dilakukan oleh dua negara atau lebih – bentuk bilateral lebih umum – dan beragam pula tujuannya mengingat bahwa negara memiliki kepentingan masing-masing dan hal ini tidak dapat dikesampingkan begitu saja ketika seorang kepala negara memutuskan untuk mengadakan kerjasama kepada suatu negara ataupun beberapa negara. Tujuan umum berdiplomasi sendiri ialah sebagai sarana mencapai kesepakatan melalui proses negosiasi untuk menyalurkan dan mengutamakan tujuan negara sehingga akan terbentuk kerjasama yang saling

menguntungkan, hingga sebagai sarana untuk memberikan bantuan apabila terdapat negara dalam kondisi yang membutuhkan bantuan akibat sedang dilanda krisis atau tertimpa kemalangan atau bencana.

Istilah diplomasi bencana atau *disaster diplomacy* secara umum merujuk pada usaha-usaha untuk mencegah, menangani dan menanggulangi terjadinya bencana menggunakan upaya-upaya diplomasi yang dilakukan antara dua negara atau lebih. Diplomasi bencana terbagi menjadi dua definisi yakni 'diplomasi' dan 'bencana'. Menurut Hedley Bull, diplomasi berarti suatu perilaku bisnis resmi yang damai di antara pemerintah negara berdaulat dan entitas terkait pemerintah lainnya yang terlibat dalam masalah politik. Sedangkan definisi bencana sendiri adalah gangguan terhadap fungsi suatu komunitas atau masyarakat yang melibatkan kerugian dan dampak manusia, material, ekonomi, atau lingkungan yang meluas yang melebihi kemampuan untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri (Kelman, *Disaster Diplomacy: How Disasters Affect Peace and Conflict*, 2012).

Mengacu pada konteks kebencanaan, seringkali suatu hal dikategorikan sebagai bencana adalah hanya yang berasal dari alam dan biasa berupa letusan gunung merapi, aktivitas tektonis bumi ataupun gejala alam lainnya. Namun sebagaimana yang didefinisikan oleh O'Keefe et al. dalam buku *Disaster Diplomacy: How disasters affect peace and conflict* karya Ilan Kelman bahwa kecenderungan terjadinya suatu bencana lebih kepada adanya campur tangan manusia itu sendiri ketimbang terjadinya suatu bencana secara alamiah murni dari perbuatan alam. Contoh yang dapat dengan jelas dipertimbangkan dalam konteks ini adalah terjadinya banjir akibat keserakahan manusia yang menebang pohon tanpa mempertimbangkan untuk melakukan upaya reboisasi. Hal ini kian diperparah dengan faktor pendukung lainnya seperti pembuangan sampah secara tidak bertanggungjawab dan penggunaan air tanah secara berlebihan juga turut mendukung penurunan muka tanah sehingga semakin memperjelas bahwa banjir tidak

semata-mata karena curah hujan yang berlebih saja, namun juga adanya campur tangan manusia dalam menciptakan adanya bencana banjir itu sendiri.

Definisi diplomasi bencana menurut Ilan Kelman ialah pemanfaatan bencana sebagai sebuah instrumen yang penting untuk memperjuangkan kepentingan politik seperti perdamaian, kepentingan ekonomi seperti kolaborasi kerjasama ekonomi antar negara secara lebih intensif, atau kepentingan sosial budaya untuk membangun komunitas yang humanis dan beradab. Diplomasi bencana lebih mengidentifikasi apakah kegiatan terkait bencana dapat atau tidak dapat memberi peluang atau mengurangi konflik dan mendorong terjadinya kerjasama, baik itu sebelum, sedang ataupun sesudah terjadinya bencana itu sendiri (Kelman, *Disaster Diplomacy: How Disasters Affect Peace and Conflict*, 2012).

*Tabel 1.1. Pendekatan dalam Teori Diplomasi Bencana Beserta Studi Kasus yang Telah Dianalisis*

<b>Nama Pathway</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Contoh Kasus</b>
Avoid Forcing	Menghindari pemaksaan dalam berdiplomasi dan menggunakan pendekatan <i>soft power</i>	- Gempa Mei 2008 di Sichuan, China
Focusing on Disaster, not Diplomacy	Mengedepankan urusan pemberian bantuan dan mengesampingkan kepentingan masing-masing pihak	- Iran dan Amerika Serikat dalam Gempa di Iran
Informal Networks	Hubungan informal bagi para ilmuwan untuk saling bertukar informasi	- Gempa di Yunani dan Turki
Multiple Levels/Tracks	Penekanan pada penggunaan banyak cara jika satu jalur diplomasi kurang ampuh untuk diterapkan	- Kenaikan tinggi air laut dan evakuasi penduduk pulau
Multi-way Process	Sinergi dan kontribusi pihak yang terlibat dalam diplomasi untuk mencapai hasil yang disepakati	- Tsunami Aceh 2004

Science	Peran para ilmuwan yang netral dari pengaruh politik untuk menjembatani upaya diplomasi	- Forum Seismologikal Timur Tengah
Symbiolism	Menggunakan keadaan bencana untuk mengubah status negara penerima bantuan menjadi negara pemberi bantuan	- Badai Katrina tahun 2005

Sumber: *Disaster Diplomacy: How Disasters Affect Peace and Conflict*

Beberapa *pathways* atau pendekatan yang dipergunakan untuk menganalisis suatu tindakan pelaku diplomasi bencana adalah ***Avoid Forcing (Hindari pemaksaan)*** atau menghindari pemaksaan dalam pengimplementasian diplomasi dalam bentuk bantuan, ***Focusing on Disaster not Diplomacy (Lebih berfokus pada faktor bencana daripada diplomasi)*** berarti bahwa upaya kerjasama awal semata-mata hanya untuk menolong tanpa ada kepentingan lainnya, ***Informal Networks (Hubungan informal)*** menyediakan pendekatan informal untuk membangun hubungan diplomasi secara formal, ***Multiple Levels/Tracks (Penggunaan diplomasi beragam cara)*** adalah upaya persiapan jika salah satu jalur diplomasi gagal untuk ditempuh, ***Multi-way Process (Proses banyak arah)*** pendekatan ini lebih berfokus pada penekanan sinergi semua pihak yang terlibat dalam diplomasi untuk mencapai keberhasilan, ***Science (sains)*** secara mudah berarti proses diplomasi bencana melibatkan ahli untuk mendukung jalannya diplomasi, dan yang terakhir ***Symbiolism (Simbiosis)*** atau pemanfaatan diplomasi bencana untuk menciptakan hubungan dengan pihak baru.

Teori diplomasi bencana pertama kali muncul di sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Ilan Kelman, seorang akademisi berkebangsaan Inggris dengan riset dan penelitiannya berfokus di bidang kebencanaan dan kesehatan yang juga merupakan tenaga pengajar di *Institute for Risk and Disaster Reduction* dan *Institute for Global Health* di *University of College London* sejak tahun 2013. Dalam buku terakhir beliau yang berjudul *Disaster Diplomacy: How Disaster Affect Peace and Conflict* terbitan tahun 2012, beliau memandang bahwa adanya suatu kegiatan yang berkaitan dengan

bencana baik sebelum (pengurangan risiko bencana, pencegahan, perencanaan, adaptasi, mitigasi, kesiapsiagaan) selama (respons, manajemen krisis, dan manajemen darurat), dan setelah terjadi bencana (pemulihan dan rekonstruksi) tidak dapat menciptakan suatu bentuk diplomasi baru namun tidak menutup kemungkinan dapat menjadi suatu katalis bagi hubungan diplomasi yang telah terbentuk pasca terjadi bencana.

Dalam bukunya juga, Ilan Kelman yang sudah meneliti berbagai kejadian bencana serta bagaimana respon negara dan dunia menanggapi bencana yang telah terjadi menyimpulkan bahwa ada tiga hasil dari diplomasi bencana:

- a. Dalam jangka pendek (jangka waktu beberapa minggu atau bulan) kegiatan terkait bencana dapat mempengaruhi hubungan diplomasi dengan mendorong upaya-upaya terjadinya diplomasi non-bencana seperti hubungan budaya, hubungan perdagangan, atau negosiasi rahasia antar pemerintahan.
- b. Dalam jangka panjang (jangka waktu tahun) faktor non-bencana memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap hubungan diplomasi daripada kegiatan yang terkait dengan kebencanaan. Contohnya adalah perubahan kepemimpinan, ketidakpercayaan, keyakinan bahwa konflik atau keluhan historis harus didahulukan daripada kebutuhan kemanusiaan dan perdamaian saat ini, atau prioritas tindakan selain resolusi konflik dan dividen diplomatik.
- c. Kegiatan terkait bencana terkadang memperburuk konflik dan merenggangkan hubungan diplomasi. (Kelman, *Disaster diplomacy Investigates How and Why Disaster-related Activities Do and Do not Influence Conflict and Cooperation*, 2012)

Penitikberatan diplomasi bencana terletak pada bagaimana diplomasi bencana dapat mempengaruhi hubungan diplomasi antara dua negara atau lebih. Untuk mendapatkan hasil dari diplomasi ini, perlu diperhatikan pula jangka waktu setelah upaya-upaya diplomasi dilakukan. Dalam jangka waktu pendek hingga sedang,

kerjasama bernuansa kebencanaan meliputi penanganan, pencegahan dan pemberian bantuan masih terasa. Namun ketika sudah menginjak jangka waktu tahunan, pola kerjasama cenderung kembali ke 'normal' dan tidak lagi berfokus ke kerjasama terkait kebencanaan. Dalam konteks pandemi COVID-19 seperti saat ini, tantangan dari bentuk diplomasi adalah agar bagaimana diplomasi dapat bertindak dan menjembatani antara kepentingan dan juga menjadi jawaban atas permasalahan disaat yang bersamaan (Triwibowo, 2020).

Saat ini, Jepang terdeteksi telah mengalami fase penurunan kasus infeksi COVID-19 dengan mencatatkan 50 kasus perhari, terendah sejak 22 Juni 2020 (The Japan Times, 2021). Apabila kita menengok kembali ke tahun lalu ketika infeksi virus pertamakali terdeteksi di negara ini pada 15 Januari 2020, Jepang sempat mengalami fase sulit penurunan angka produksi industri – tulang punggung ekonomi Jepang – sebesar 9,5% dan yang terendah sejak 2013 dan fase kenaikan penularan ekstrim dengan kasus tertinggi tercatat sebesar 25.992 pada 20 Agustus 2021 (The Japan Times, 2021). Penanganan terhadap virus menjadi salah satu kepentingan pemerintah tidak terkecuali pemerintah Jepang untuk menjaga kestabilan keadaan dalam negeri dan perlahan memperbaiki kondisi perekonomian yang berhenti akibat pandemi COVID-19.

Di dalam bukunya juga, Ilan Kelman mengatakan bahwa adanya bencana yang timbul baik dari faktor alam maupun non-alam dapat berpotensi untuk menjadi dukungan bagi aktivitas diplomasi melalui terjadinya kesepakatan antara pihak negara yang menjadi korban dan negara pemberi bantuan. Apabila hubungan diplomatik yang harmonis sebelumnya telah terbentuk antara kedua negara disamping hubungan terkait kebencanaan, maka konsep diplomasi bencana dapat menjadi suatu *katalis* yang berfungsi untuk menjembatani lebih banyak kesepakatan dan kerjasama diantara kedua negara dimasa mendatang (Kelman, *Disaster Diplomacy: How Disasters Affect Peace and Conflict*, 2012). Dalam kasus Jepang dan Indonesia yang keduanya sama-sama

terdampak bencana COVID-19 ini, kedua negara dapat saling berinisiatif untuk menjajaki penguatan kerjasama yang sempat mandek akibat gelombang puncak kasus pandemi beberapa waktu yang lalu.

Negara merupakan entitas Internasional yang sarat akan kepentingan dan setiap tindakan pada umumnya akan selalu mengutamakan aspek keuntungan apakah tindakan yang telah dilakukan dan kebijakan yang dirumuskan akan membawa keuntungan lebih bagi negara yang bersangkutan. Pemberian bantuan dalam kondisi bencana sekalipun akan selalu diutamakan untuk menjaring keuntungan bagi negara pemberi, contohnya dapat kita saksikan dari skema pemberian ‘bantuan’ oleh Jepang senilai 600 Miliar Yen dalam bentuk *Official Development Assistance* kepada Indonesia sebagai dana untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat Tsunami 2004 di Aceh. Kepentingan Jepang barulah terlihat ketika pemerintah Indonesia dibawah Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keleluasaan bagi pebisnis Jepang untuk berinvestasi di Indonesia, terlebih ketika skema perjanjian kerjasama bilateral IJ-EPA dibentuk pada tahun 2008. Tidak dapat disimpulkan secara sepihak apakah perjanjian IJ-EPA merupakan bentuk ‘politik balas budi’ Indonesia kepada Jepang atas pemberian bantuan pada 2004 silam, namun hasil dari IJ-EPA dapat dinilai lebih menguntungkan Jepang daripada Indonesia meskipun kerjasama ini berstatus sebagai kerjasama bilateral (Limpas & Fahd, 2020).

Dalam menganalisis studi kasus COVID-19 kaitannya dengan upaya kerjasama internasional yang mengalami kendala di kala pandemi seperti saat ini adalah dengan menggunakan *pathways* yang disarankan dengan menggunakan pendekatan *focusing on disaster, not diplomacy*. Pendekatan jenis ini mirip dengan yang digunakan oleh pemerintah Jepang dan Indonesia terutama dalam konteks kerjasama ekonomi seperti perdagangan ketika pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020 hingga sekarang, dengan memanfaatkan hubungan kedekatan yang terjalin lebih dari 60 tahun

lamanya dan tujuan untuk bangkit bersama-sama ditengah pandemi yang membuat ekonomi kedua negara saling terpuruk. Dalam konteks pandemi saat ini, pendekatan *focusing on disaster, not diplomacy* tercermin dari beragam kerjasama yang masih berlaku bahkan di saat pandemi antara kedua negara, salah satunya melalui skema penguatan kerjasama bilateral atau memanfaatkan kerjasama dalam *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)* serta *Official Development Assistance (ODA)*, dan dengan adanya momentum pandemi COVID-19 berpotensi mampu mengubah motif dan kepentingan kedua negara dalam menjalankan kerjasama baik ODA maupun IJ-EPA untuk mengutamakan prinsip keuntungan non-materialis, atau lebih memfokuskan kepada pemulihan keadaan negara untuk menunjang jalannya perdagangan yang sempat terhenti dan menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang dari topik tulisan ilmiah ini dengan dibantu kerangka pemikiran diplomasi bencana, strategi yang akan digunakan oleh Jepang dalam melangsungkan kerjasama bilateral selama pandemi COVID-19 dengan Indonesia adalah melalui

1. Serangkaian usaha pemerintah Jepang untuk menurunkan laju penularan COVID-19 di negaranya berupa pengenalan *Cluster-Based Approach*, pemberlakuan *State of Emergency* di seluruh wilayah Jepang, serta program vaksinasi massal
2. Penerapan diplomasi bencana dalam pelaksanaan kerjasama berupa pemberian bantuan penanganan Pandemi COVID-19 dalam kerangka ODA dan normalisasi hubungan perdagangan melalui IJ-EPA.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Apabila penulis berhasil menyelesaikan tulisan ilmiah ini secepat mungkin sebelum pandemi COVID-19 berakhir, secara umum penulis berharap agar sekiranya dapat mencari jawaban dari hipotesa mengenai bagaimana kedua negara tetap dapat menjalankan

perdagangan meskipun ditengah pandemi COVID-19, serta bagaimana kedua negara merespons dampak yang ditimbulkan akibat adanya pandemi seperti saat ini.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Penulis dalam menyusun skripsi ini hanya akan menggunakan studi kasus yang terjadi di awal pandemi COVID-19 yang terjadi di kedua negara yakni sekitar awal tahun 2020 hingga sekarang demi menciptakan tulisan yang terarah dan spesifik.

#### **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini akan digunakan pendekatan deskriptif analitis guna menjelaskan secara mendetail apa saja yang akan dibahas dalam skripsi ini, dan untuk metode pengumpulan data akan lebih berfokus pada *library research* dalam bentuk data-data sekunder seperti melalui jurnal, buku, karya akademik dan melalui media online.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

**BAB I**, pada bab ini berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**, pada bab ini berisi pembahasan mengenai perkembangan hubungan diplomatik dengan fokus di bidang ekonomi antara Jepang dan Indonesia dari zaman ke zaman hingga masa pandemi COVID-19.

**BAB III**, bab ini berisi pembahasan mengenai strategi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam merespons adanya pandemi COVID-19 dalam mengamankan kerjasama ekonomi dengan Indonesia.

**BAB IV**, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis data dan pembahasan dari penelitian ini.